

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Keputusan Cina untuk mengajukan keanggotaan dalam *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* atau CPTPP pada tahun 2021 bukanlah langkah yang bersifat spontan atau simbolis, melainkan manifestasi dari strategi ekonomi-politik yang dirancang secara matang dan terukur. Langkah ini merepresentasikan dinamika kebijakan luar negeri ekonomi Cina yang tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan eksternal, tetapi juga erat kaitannya dengan kebutuhan internal untuk menata ulang arah pembangunan nasional di tengah tantangan domestik dan global yang kompleks.

Secara internal, Cina menghadapi sejumlah tekanan struktural yang mendorong kebijakan reformasi ekonomi secara lebih agresif. Perlambatan pertumbuhan, kesenjangan pembangunan antarwilayah, ketergantungan pada sektor industri tradisional, serta kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam sektor strategis menjadi isu utama yang perlu direspon. Dalam konteks ini, CPTPP dipandang sebagai alat untuk memperkuat agenda reformasi domestik melalui mekanisme tekanan eksternal (*external pressure*). Ketentuan dalam CPTPP yang menuntut keterbukaan pasar, reformasi pada perusahaan milik negara (BUMN), serta perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual memberikan insentif kuat bagi Cina untuk mempercepat proses transformasi ekonominya agar sejalan dengan praktik internasional yang diakui. Dengan kata lain, keterlibatan dalam CPTPP diproyeksikan sebagai sarana untuk mendorong reformasi internal secara lebih kredibel dan terintegrasi dengan sistem global.

Dari sisi eksternal, Cina berhadapan dengan lingkungan strategis yang semakin kompetitif. Rivalitas dengan Amerika Serikat, pergeseran arsitektur ekonomi kawasan pasca keluarnya Amerika Serikat dari TPP, serta meningkatnya kecenderungan proteksionisme global pasca-pandemi COVID-19 menjadi faktor pendorong utama.

Dalam konteks ini, pengajuan keanggotaan dalam CPTPP merupakan strategi untuk mengamankan posisi Cina di tengah ketidakpastian global sekaligus menjaga akses terhadap pasar internasional yang lebih beragam dan stabil. Melalui keikutsertaan dalam forum multilateral ini, Cina berupaya mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Amerika Latin yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Langkah ini menunjukkan bahwa Cina tidak hanya ingin bertahan dari tekanan global, tetapi juga ingin memperluas pengaruh dan memperkuat peran sebagai kekuatan ekonomi yang konstruktif.

Lebih jauh, langkah ini juga mencerminkan dorongan Cina untuk memperbaiki citra internasionalnya dan memperkuat legitimasi sebagai negara yang mendukung sistem perdagangan berbasis aturan (*rules-based economic order*). Selama beberapa tahun terakhir, Cina kerap menghadapi kritik terkait praktik ekonomi yang dianggap tidak adil, seperti subsidi industri, dominasi BUMN, serta intervensi negara yang kuat. Dengan bergabung dalam perjanjian perdagangan yang dikenal memiliki standar tinggi seperti CPTPP, Cina ingin mengirimkan pesan bahwa mereka siap untuk beradaptasi, menjalankan reformasi, dan menjadi bagian dari komunitas global yang mengedepankan transparansi, kompetisi sehat, dan keterbukaan. Ini merupakan bagian dari strategi *normative signaling*, di mana negara menggunakan keterlibatan institusional untuk membangun narasi positif dan memperkuat kepercayaan mitra internasional terhadap komitmen dan intensi kebijakan ekonomi mereka.

Jika ditinjau melalui kerangka teori *developmentalist state*, keputusan ini menggarisbawahi bagaimana peran negara di Cina tetap menjadi sentral dalam menentukan arah pembangunan. Negara tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai perancang kebijakan strategis yang secara aktif merespons perubahan global dan menyesuaikannya dengan prioritas nasional. Pemerintah Cina memanfaatkan peluang dari kerja sama ekonomi internasional bukan hanya untuk tujuan akses pasar, tetapi juga untuk membentuk struktur kebijakan ekonomi yang lebih tahan terhadap tekanan eksternal dan lebih kompetitif di level global. Dalam

pendekatan ini, keanggotaan dalam CPTPP menjadi instrumen penting dalam menggabungkan kepentingan nasional dan peluang global melalui kebijakan yang terkoordinasi dan terukur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keputusan Cina untuk mengajukan keanggotaan dalam CPTPP pada periode 2020–2021 merupakan hasil gabungan antara tekanan domestik dan respons terhadap dinamika eksternal. Keterlibatan dalam CPTPP bukan hanya tentang peluang perdagangan semata, melainkan mencerminkan upaya sistematis Cina untuk memperkuat posisi ekonomi, memperluas pengaruh regional, memperbaiki persepsi internasional, serta menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa Cina tidak hanya ingin menjadi pemain penting dalam ekonomi global, tetapi juga menjadi aktor yang memiliki pengaruh dalam menyusun arah masa depan dalam tatanan ekonomi dunia.

6.2 Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis berupaya menyampaikan sejumlah saran yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu saran praktis dan saran teoritis. Saran praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pelaksanaan program maupun perumusan kebijakan di masa mendatang. Sementara itu, saran teoritis ditujukan untuk mendukung pengembangan kajian akademik, khususnya di bidang hubungan internasional, serta memperkaya analisis terhadap program dan kebijakan yang relevan di masa depan.

6.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran dari strategi Cina dalam memanfaatkan kerja sama internasional sebagai sarana memperkuat posisi ekonomi nasional, termasuk dalam

mengelola ketegangan geopolitik dan tantangan global. Salah satu langkah yang relevan adalah mendorong reformasi struktural di sektor industri dan investasi melalui insentif yang mendukung efisiensi, inovasi, serta keterbukaan terhadap pasar regional.

Selain itu, pemerintah dapat mulai mengkaji potensi keanggotaan Indonesia dalam forum ekonomi multilateral seperti CPTPP sebagai upaya memperluas akses pasar dan meningkatkan daya tawar dalam negosiasi perdagangan internasional. Langkah ini penting sebagai strategi diversifikasi, agar ketergantungan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak menjadi sumber kerentanan dalam jangka panjang. Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat diplomasi ekonomi dengan pendekatan berbasis aturan dan standar tinggi agar lebih kompetitif dan kredibel di mata mitra global.

6.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memahami peran negara sebagai aktor utama dalam proses integrasi ekonomi internasional, terutama dalam konteks negara-negara yang menganut model *developmentalist state*. Untuk pengembangan kajian ke depan, disarankan adanya studi perbandingan yang mengkaji bagaimana negara-negara lain, baik di Asia Timur maupun kawasan Global South, merespons tantangan ekonomi global dengan pendekatan serupa. Perbandingan tersebut dapat membantu mengidentifikasi pola kebijakan yang paling efektif dalam menghadapi tekanan eksternal.

Selain itu, pendekatan *developmentalist state* perlu dikaji lebih lanjut dengan mengintegrasikan dimensi geopolitik dan diplomasi ekonomi dalam analisisnya. Pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana negara menggunakan instrumen ekonomi luar negeri

untuk mempertahankan stabilitas dan kepentingan domestik. Di sisi lain, penggunaan pendekatan kuantitatif juga dapat memperkuat analisis dampak kebijakan secara empiris, misalnya dalam mengukur pengaruh keterlibatan dalam perjanjian seperti CPTPP terhadap ekspor, investasi asing langsung, atau reformasi domestik. Kajian-kajian semacam ini akan memperkaya diskursus akademik dalam studi ekonomi politik internasional yang semakin relevan dengan dinamika global saat ini.

Mengingat bahwa pada saat penelitian ini diselesaikan, yakni pada bulan Juni tahun 2025, proses akses Cina ke dalam CPTPP masih berada dalam tahap yang belum selesai dan terus mengalami perkembangan, maka disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut perkembangan proses keanggotaan tersebut. Penelitian di masa mendatang dapat memfokuskan diri pada dinamika negosiasi antara Cina dan negara-negara anggota CPTPP, perubahan sikap dan posisi politik masing-masing negara anggota terhadap keanggotaan Cina, serta implikasi strategis dari keterlibatan Cina dalam perjanjian ini terhadap struktur geopolitik dan sistem perdagangan internasional. Mengingat kompleksitas dan sensitivitas isu ini, studi lanjutan akan sangat penting untuk memahami bagaimana kepentingan ekonomi-politik Cina bertransformasi dalam menghadapi arsitektur perdagangan regional yang terus berkembang.